

ABSTRAK

ANALISIS HASIL AUDIT DAN KORUPSI DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

**Oleh
INDAH DWI CAHYA PUTRI**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis pengaruh hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah terhadap korupsi di Indonesia yang dimoderasi oleh reformasi birokrasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan perolehan opini WTP dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari BPK yang diikuti dengan peningkatan jumlah korupsi serta adanya inkonsistensi atas hasil penelitian sebelumnya. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah korupsi, sementara variabel independen yang digunakan adalah hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah yang diprosikan dengan opini audit, temuan kelemahan sistem pengendalian internal, temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pada penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu reformasi birokrasi.

Penelitian ini menggunakan populasi penelitian pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 1.518 pemerintah daerah kabupaten/kota pada periode pengamatan tahun 2019 s.d 2021. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 25 untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dan variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh positif terhadap korupsi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap korupsi. Namun, penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap korupsi dan pada temuan kelemahan SPI menunjukkan hasil bahwa temuan kelemahan SPI tidak berpengaruh terhadap korupsi. Pada penelitian ini menambahkan reformasi birokrasi dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak memperkuat pengaruh opini audit, temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, temuan kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah serta tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap korupsi. Hal ini berarti tata kelola yang dilakukan pemerintah belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Korupsi, Hasil Audit LKPD, Tata Kelola, Reformasi Birokrasi

ABSTRACT

ANALYSIS OF AUDIT RESULTS AND CORRUPTION WITH BUREAUCRATIC REFORM AS A MODERATING VARIABLE

**By
INDAH DWI CAHYA PUTRI**

This research generally aims to analyze the influence of the results of local government financial audit on corruption in Indonesia moderated by bureaucratic reform. The study is motivated by a phenomenon indicating an increase in the issuance of Unqualified Opinion (WTP) and follow-ups from the Supreme Audit Agency (BPK), accompanied by an increase in the incidence of corruption and inconsistencies in previous research findings. The dependent variable in this study is corruption, while the independent variables include the results of local government financial audit, proxied by audit opinion, findings of internal control system weaknesses, non-compliance with regulations, and follow-ups from audit results. Bureaucratic reform is introduced as a moderating variable in this research.

The population of this study comprises the regency/city governments in Indonesia, with a sample size of 1,518 local governments observed during the period from 2019 to 2021. Multiple linear regression analysis using SPSS 25 is employed to predict the relationship between independent variables, dependent variables, and the moderating variable. The results indicate that non-compliance with regulations has a positive impact on corruption, while follow-ups from audit results have a negative impact on corruption. However, the research fails to establish a positive correlation between audit opinions and corruption. The findings also suggest that weaknesses in the internal control system do not significantly affect corruption. The addition of bureaucratic reform to the study shows that it does not strengthen the influence of audit opinions, non-compliance with regulations, weaknesses in the government's internal control system, and follow-ups from audit results on corruption. This implies that the government's governance has not been effective in preventing corruption.

Keywords: Corruption, The Results Of The Local Government Financial Audit (LKPD), Governance, Bureaucratic Reform